

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM KECAMATAN SUNGAI PINANG PADA UPT DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SAMARINDA

Audya Dewintha¹

Audya Dewintha, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Achmad Djumlani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Enos Paselle S.Sos, M.AP selaku pembimbing II.

Latar belakang penulis ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang meliputi proses pengurangan dan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus yaitu Penanganan Sampah dengan indikator Pemilahan Kembali Sampah, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan penelitian arsip-arsip secara dokumen yang ada pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Sumber data yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dengan key informan adalah Kepala Bidang Teknik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Informan adalah Lurah, Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Petugas Kebersihan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu masih belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Baik pemerintah maupun masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam kewajiban pengelolaan sampah. Dan juga adanya masalah kurangnya anggaran, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta lemahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Pengelolaan Sampah*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : dheaudya@gmail.com

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan serta keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan menurut aspirasi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur hak dan kewajiban daerah otonom dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan. Perubahan besar pada daerah otonom yang terjadi meliputi perubahan struktur ekonomi, pola konsumsi, teknologi, sistem nilai, sumberdaya alam, dan yang terpenting adalah terjadi perubahan fisik wilayah dan lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perkembangan penduduk, tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, serta penyesuaian terhadap teknologi dan kebudayaan. Dalam hal ini faktor lingkungan sangat menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya pengelolaan sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna sesuai dengan sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan penambahan informasi ilmiah dalam studi Kebijakan Publik, serta memberikan kontribusi bagi pengetahuan, khususnya pengetahuan yang terkait dengan masalah Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait dengan pengelolaan sampah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Teori dan Konsep

Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seseorang ahli studi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2012 : 139), mendefinisikan Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan.

Menurut Agustino (2012 : 129) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono, 2009 : 39) model implementasi kebijakan memiliki beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Meter dan Horn adalah sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang.
- 2) Sumber daya menunjuk kepada sebesar berapa dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
- 3) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin diadakan, tempat dan waktu.
- 4) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- 5) Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori-teori yang ada, maka definisi konsepsional dari penelitian implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah kegiatan penanganan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang berkesinambungan dan sistimatis oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda serta partisipasi seluruh masyarakat agar mewujudkan Kota Samarinda khususnya Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang yang berwawasan lingkungan yang hijau, sehat dan bersih dari sampah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan sesuatu yang baik dalam ilmu pengetahuan atau kemasyarakatan, mengembangkan serta menguji kebenaran, dimana usaha tersebut dilakukan dengan metodologi ilmiah dan dengan harapan bahwa hasilnya akan menolong memecahkan masalah atau memperbaiki dengan cara tertentu.

Sugiyono (2009 : 11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga berdasarkan tujuan dan pendapat tersebut maka jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat deskriptif.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Dalam pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda meliputi:
 - a. Pemilahan sampah
 - b. Pengumpulan sampah
 - c. Pengangkutan sampah
 - d. Pengolahan sampah
 - e. Pemrosesan akhir sampah
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Dalam pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan narasumber yang dipilih melalui teknik *Purposive Sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal serta teknik *accidental sampling*, yaitu terdiri atas kelompok individual yang siap dan layak, *accidental sampling* dalam hal ini penggunaan jasa sehat terdiri dari semua orang yang mau diwawancarai. Sebagai langkah pertama, peneliti memilih *key informan*, yaitu Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, serta *informan* yaitu:

1. Staff Pegawai kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dengan pertimbangan sebagai pelaksana teknis di lapangan.
2. Lurah Sungai Pinang Dalam
3. Masyarakat dengan kriteria :
 - a. Masyarakat yang tempat tinggalnya berada di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - b. Masyarakat yang memiliki tempat usaha.
 - c. Ketua RT setempat.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara dan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan peneliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
 - a. Dokumen-dokumen, laporan-laporan DKP, dan data kependudukan dari Kelurahan.

- b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian
- c. Internet

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2009 : 244), analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan mempergunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Alat analisis yang dipergunakan adalah alat analisis model interaktif Milles dan Huberman (2007:16) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Samarinda yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki topografi yang cenderung mendatar dan terletak di dataran rendah. Kota Samarinda terletak pada ketinggian 7-25 meter dari permukaan laut dan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 1997 tentang penempatan batas wilayah dan secara administratif Kota Samarinda memiliki wilayah dengan luas total 71.800 Ha.

Pemilahan Sampah

Pengumpulan sampah didefinisikan sebagai pemindahan sampah dari sumber sampah (kawasan pemukiman dari kawasan perdagangan) ke tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Pada sistem ini umumnya dilakukan menggunakan jasa petugas kebersihan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan dengan Lurah, RW, RT, Karang Taruna atau Organisasi Pemuda. Pengumpulan sampah yang dilakukan yaitu dengan cara petugas lingkungan membawa gerobak mendatangi rumah penduduk secara *door to door*. Beberapa kelurahan di Samarinda telah melakukan sistem seperti ini.

Pengangkutan Sampah

Menurut Sudrajat (2007 : 56), Pengangkutan sampah didefinisikan sebagai upaya pemindahan masa sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lokasi TPS bila mungkin berada di dalam lingkungan sumber sampah. Namun, bila tidak memungkinkan maka harus diupayakan lokasinya berada di Kecamatan. Setiap kecamatan baiknya memiliki 1

buah TPS 1.000-2.000 m yang dilengkapi oleh pengelolaan sampah menjadi kompos.

Pengolahan Sampah

Pengolahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dihasilkan di TPS/TPST dan TPA.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Norsalim selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan Akhir sampah yang dimaksud adalah dengan cara pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat/kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam upaya penanganan Pengelolaan sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, yaitu masih adanya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal melakukan pemilahan sampah kering dan sampah basah dan juga dalam hal waktu pembuangan sampah. Dimana ketidakdisiplinan masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah. Belum lagi hambatan lain seperti masyarakat yang tidak mau peduli akan akibat prilakunya dengan membuang sampah ke parit ataupun ke sungai.

Pembahasan

Pemilahan Sampah

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, pertama kali yang dilakukan adalah pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi pelaksanaan program tersebut belum terlaksana dengan baik. Sebelum diangkut, sampah harus dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenis sampah yang dapat digunakan kembali atau tidak dan selebihnya sampah bisa dijual kepada pemulung atau dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang baru.

Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, akan tetapi di lapangan

masih banyak terlihat warga yang membuang sampah tidak pada waktu dan tempatnya.

Pengangkutan Sampah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Pengangkutan sampah merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akan tetapi masih banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah tersebut, seperti masih kurangnya jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Selain itu masih banyak warga yang membuang sampah pada siang hari.

Pemrosesan Akhir Sampah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pengelolaan Sampah. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pengolahan sampah di TPA pada umumnya ada dua jenis yaitu *Open Dumping* dan *Sanitary Landfill*.

TPA yang ada di Samarinda masih menggunakan sistem *Open Dumping* atau masih dihamparkan di lahan terbuka. Sedangkan peraturan yang ada mengharuskan TPA yang ada menggunakan sistem *Sanitary Landfill* atau menimbun sampah di area yang telah digali untuk kemudia ditutup dengan tanah. Untuk itulah pembangunan TPA Sambutan telah dirancang untuk menggunakan sistem *Sanitary Landfill*. Teknologi *Landfill* yang dikenal umum adalah sampah dimasukkan ke dalam lubang, lalu bagian atas sampah ditimbun tanah, selanjutnya bagian atas timbunan tanah tersebut ditimbun lagi dengan sampah dan ditutup lagi oleh tanah begitu seterusnya. Dengan demikian warga sekitar lokasi TPA tidak akan terganggu oleh bau yang menyengat dari sampah-sampah tersebut.

Faktor Penghambat

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda belum mencapai hasil yang optimal. Dalam perjalanan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan tersebut. Adapun Faktor-faktor ini jika dilaksanakan dengan baik tentu akan menjadi pendukung bagi Implementasi Kebijakan Penanganan Pengelolaan Sampah tersebut.

Faktor-faktor tersebut menurut Edward III (dalam Widodo, 2008 : 96) yakni ; 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Sehubungan dengan faktor Komunikasi dalam implementasi menurut teori Edward III (dalam Widodo, 2008 : 96) dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan.

Sumber Daya

Faktor sumber daya juga punya peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, suku cadang, tanah dan lain-lain).

Faktor Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penanganan pengelolaan sampah agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Oleh karena itu sumber daya sangat menentukan supaya implementasi dapat berjalan dengan efektif. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sumber daya yang dimaksud antara lain sumber daya manusia yakni pegawai yang mengelola sampah, ketersediaan dana untuk membiayai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan dukungan sarana prasarana untuk menjalankan implementasi program. Semua sumber daya tersebut harus memadai dan saling menunjang satu sama lain agar implementasi dapat berjalan dengan efektif. Jika salah satu sumber daya kurang mendukung maka implementasi Penanganan pengelolaan sampah tidak akan optimal.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah telah dijelaskan bahwa penyediaan atau pengadaan TPS, pengangkut sampah dari TPS ke TPA termasuk menyediakan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan jasa.

Disposisi

Selanjutnya faktor Disposisi. Edward III (dalam Widodo, 2008 : 96) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan tujuannya mewujudkan Kota Samarinda yang asri, bersih dan sehat tentunya masih belum

sepemahaman dengan masyarakat Samarinda khususnya daerah Kecamatan Sungai Pinang Dalam. Berdasarkan data sekunder dari hasil penelitian, hal tersebut terindikasi dari budaya masyarakat yang masih belum menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan sampah tersebut. Masih banyaknya sampah yang terdapat dilingkungan Kecamatan Sungai Pinang Dalam yang belum dikelola dengan baik oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya komitmen yang dibangun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dengan masyarakat adalah sebagai salah satu bagian dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para pegawai pengelola Implementasi Kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi ditentukan juga oleh kemauan para pegawai yang memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu Pimpinan dan pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda harus memiliki kemauan dan keinginan serta kecenderungan untuk melaksanakan pengelolaan sampah tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan dapat tercapai.

Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang dibahas adalah struktur Birokrasi. Berbicara tentang birokrasi, bisa saja tidak dapat berjalan dengan efektif karena struktur birokrasi yang ada tidak efisien. Struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebab meskipun sumber-sumber daya yang ada cukup memadai dan para pegawai mengetahui apa dan bagaimana melakukannya namun apabila struktur organisasinya tidak efisien maka tujuan dan sasaran tidak akan efektif.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam proses penanganan sampah yang meliputi beberapa tahap mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Diantara tahapan-tahapan tersebut yang belum berjalan secara maksimal adalah tahapan pengolahan sampah. Hal ini disebabkan minimnya lokasi pengolahan sampah di Samarinda saat ini serta kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan.

2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kersihan dan Pertamanan tentang pengelolaan sampah dikelurahan sungai Pinang Dalam adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai masalah sampah walaupun masyarakat telah mengetahui aturan tentang penertiban sampah melalui berbagai macam kegiatan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu menambah instensitas sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar tidak hanya sesekali tetapi bisa dilakukan berkali-kali agar masyarakat menjadi paham bagaimana mengelola sampah yang baik.
2. menganggarkan penambahan jumlah TPS/container dan menambah atau memperbaiki armada pengangkutan serta menambah petugas kebersihan di Kota Samarinda khususnya Kelurahan Sungai Pinang Dalam seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal.
3. Perlu adanya pengawasan secara langsung untuk menindak masyarakat yang diketahui dan tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga proses pengawasan aktivitas masyarakat membuang sampah lebih efektif dan efisien.
4. Dalam pengadaan sarana dan prasarana di bidang kebersihan, sebaiknya Pemerintah Kota Samarinda lebih memprioritaskan daerah atau lingkungan yang cepat menghasilkan sampah atau dengan kata lain daerah yang jumlah penduduknya lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 1984. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Sosial, Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Slamet, JS. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat. 2007. *Mengelola Sampah Kota, Solusi Mengatasi Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suriawiria, Unus. 2002. *Pupuk Organik Kompos Dari Sampah*, Bioteknologi Argoindustri. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.Yogyakarta : CAPS
- Widjaja. HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet

- Isvara, 2013. *Jenis-jenis Sampah*.
<http://ayodarling.wordpress.com/2013/04/07/jenis-jenis-sampah/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2013)

Dokumen-Dokumen

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penertiban Sampah dan Kebersihan Lingkungan.